

Peran Komoditi Pajale (Padi, Jagung, Kedelai) dalam Pembangunan Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Syahrial^{1*}

¹Universitas Tamansiswa, Jalan Tamansiswa No. 9 Padang, Sumatera Barat; *e-mail: arialdm@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan era Joko Widodo berupaya meningkatkan swasembada tiga komoditi pangan dengan mengeluarkan program Upaya Khusus Percepatan Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai atau yang dikenal dengan UPSUS PAJALE. Pemerintah daerah tentu dilibatkan dalam rangka mencapai swasembada pangan. Karena adanya program tersebut akan berdampak pada peningkatan produksi komoditi sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi basis komoditi pajale, (2) Menganalisis spesialisasi dan lokalisasi dari komoditi pajale setiap daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, (3) Mengidentifikasi komoditi prioritas setiap daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif di mana data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Hanya satu kabupaten yang menjadi basis untuk komoditi pajale yaitu Kabupaten Solok Selatan, (2) Tidak ada satu pun kabupaten yang terspesialisasi dan terlokalisasi komoditi pajale, artinya komoditi pajale tersebar secara merata di setiap daerah kabupaten, (3) Komoditi padi menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Padang Pariaman. Komoditi jagung hanya diprioritaskan di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tidak ada satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang bisa diprioritaskan untuk mengembangkan komoditi kedelai.

Kata Kunci: Komoditi Basis, Pembangunan Daerah, Swasembada pangan, upsus pajale.

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras. Di mana beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari

200 juta orang. Swasembada beras berhasil dicapai melalui program pemerintah masa itu, antara lain (Simatupang dan Rusastra, 2004): (1) pembangunan lahan dan irigasi, (2) inovasi teknologi dan intensifikasi usahatani, (3) penyediaan sarana produksi, (4) pemberian insentif, (5) pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian

(alsintan) dan (6) pembangunan kelembagaan.

Setelah beberapa kali periode pergantian presiden, sampai saat ini swasembada beras belum mampu tercapai kembali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya tercapai swasembada beras saat ini, yaitu (1) Pertambahan jumlah penduduk yang signifikan tidak dibarengi dengan pertambahan luas lahan pertanian. (2) Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non pangan atau pemukiman yang disebabkan karena harga produk komoditi non pangan (seperti tanaman perkebunan) relatif lebih tinggi dan proses budidaya relatif mudah. (3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi yang tidak direvitalisasi sehingga menyulitkan petani memperoleh sarana produksi. (4) Input produksi seperti pupuk yang sulit diperoleh ketika musim tanam karena langka di pasaran.

Namun, terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh membawa program yang cukup ambisius untuk mencapai swasembada pangan bukan hanya beras tetapi juga untuk komoditi jagung dan kedelai. Untuk mempercepat swasembada pangan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Upaya

Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajele) yang tertuang dalam peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2015.

Program Upsus Pajale yang baru dimulai pada tahun 2015 selain bertujuan untuk mencapai swasembada, juga untuk mengurangi volume impor untuk ketiga komoditi tersebut. Pada tahun 2012 – 2014 menunjukkan peningkatan volume impor untuk komoditi kedelai dan jagung. Volume impor kedelai naik dari 1.220.120 ton menjadi 1.964.081 ton, sedangkan volume impor jagung naik dari 1.805.392 ton menjadi 3.175.362 ton. Kemudian volume impor komoditi beras mengalami peningkatan di tahun 2014 dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 472.665 ton menjadi 855.164 ton. Tetapi penurunan volume impor komoditi Jagung dan Kedelai juga terjadi yaitu pada tahun 2012. Volume impor kedelai pada tahun 2011 sebesar sebesar 2.088.616 ton menjadi 1.220.120 ton pada tahun 2012. Volume impor jagung pada tahun 2011 sebesar 3.207.657 ton menjadi 1.805.392 ton pada tahun 2012. Namun, volume impor komoditi beras mengalami penurunan hingga tahun 2013 yaitu pada tahun 2011 sebesar 2.750.476 menjadi 472.665 ton pada tahun 2013 (Kementerian Pertanian 2015).

Volume impor beras yang cenderung menurun diikuti dengan peningkatan produksi padi, namun untuk komoditi Jagung dan Kedelai peningkatan impor juga dibarengi dengan peningkatan produksi. Produksi padi pada tahun 2011 sebesar 62.527.607 ton menjadi 71.776.496 ton pada tahun 2015. Produksi jagung sebesar 17.643.250 ton menjadi 19.612.432 ton pada tahun 2015. Kemudian produksi kedelai pada tahun 2011 sebesar 851.286 ton menjadi 963.183 ton pada tahun 2015. Penurunan jumlah produksi komoditi jagung dan kedelai hanya terjadi di tahun 2013 (BPS Indonesia, 2016). Namun dengan adanya kecenderungan peningkatan volume impor dan konsumsi penduduk terhadap komoditi pajale maka perlu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi salah satunya dengan adanya Upsus Pajale.

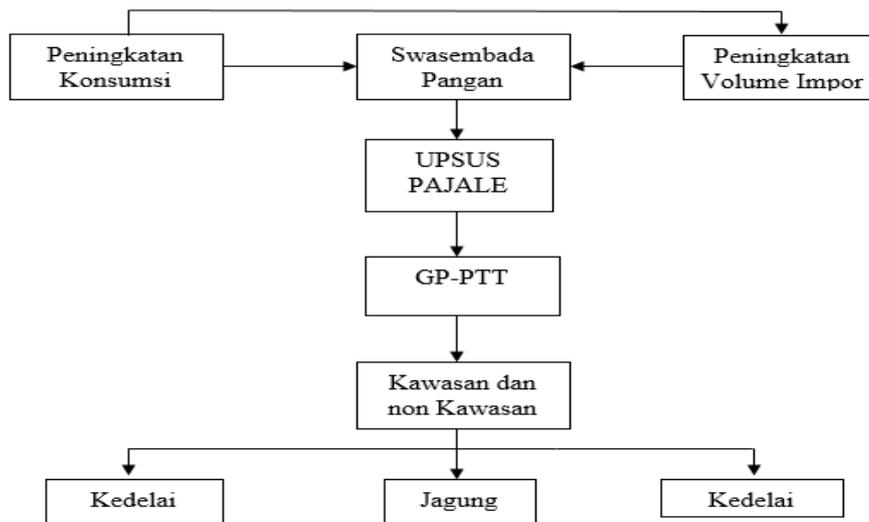
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tentunya terlibat dalam rangka pelaksanaan program Upsus Pajale. Di Provinsi Sumatera Barat, produksi padi meningkat pada tahun 2011 sebesar 2.254.547 ton menjadi 2.524.775 ton pada tahun 2015. Dan produksi komoditi jagung juga meningkat dari pada tahun 2011 sebesar 471.849 ton menjadi 602.549 ton pada tahun 2015. Sedangkan produksi komoditi kedelai yang cenderung

mengalami penurunan jumlah produksi selama tahun 2011 – 2015. Produksi kedelai pada tahun 2011 mencapai 1.925 ton, namun pada tahun 2015 hanya menjadi 353 ton (BPS Indonesia, 2016).

Penurunan produksi komoditi kedelai terjadi salah satunya karena daerah-daerah di Provinsi Sumatera Barat hanya beberapa saja yang memproduksi komoditi kedelai. Berbeda dengan komoditi padi yang hampir merata di semua daerah memproduksi padi. Sedangkan produksi komoditi jagung, hanya dominan di beberapa daerah saja seperti di Kabupaten Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan Agam yang menjadi tiga besar daerah yang memproduksi komoditi jagung di Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2016).

Produksi komoditi pajale belum tersebar secara merata di Provinsi Sumatera Barat, bahkan tidak ada satu daerah pun yang memiliki produksi untuk ketiga komoditi tersebut secara merata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Sumatera Barat, dari 12 daerah kabupaten hanya 1 daerah kabupaten yang tidak terlibat dalam program tersebut yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kemudian untuk mencapai target program Upsus Pajale, salah satunya



dengan adanya upaya Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT). Dalam GP-PTT ini, wilayah dibagi menjadi kawasan dan non kawasan. Pertimbangan kawasan dan non kawasan ini berdasarkan basis dan non basis komoditi. Apabila daerah tersebut menjadi basis komoditi maka daerah tersebut sebagai kawasan, sedangkan jika daerah tersebut tidak menjadi basis komoditi maka daerah tersebut sebagai non kawasan. Maka perlu diketahui potensi komoditi pangan di setiap daerah untuk efektivitas dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi kabupaten mana saja di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi basis komoditi pajale. (2) Menganalisis spesialisasi dan lokalisasi dari komoditi pajale daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. (3) Mengidentifikasi komoditi pajale prioritas

yang bisa dikembangkan di setiap daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak bisa dibendung berakibat pada peningkatan kebutuhan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang permintaannya terus meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah dan lahan produksi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pemerintah melakukan impor untuk komoditi pangan khususnya padi, jagung dan kedelai. Volume impor untuk komoditi tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan peningkatan volume ekspor sehingga terjadi defisit neraca perdagangan yang merugikan Indonesia.

Pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar

untuk swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian pemerintah mengeluarkan program Upsus Pajale untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan dengan adanya GP-PTT. Pendekatan yang digunakan pada kebijakan ini yaitu pendekatan wilayah di mana setiap wilayah ditentukan sebagai kawasan dan non kawasan untuk komoditi pangan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Sehingga setiap wilayah bisa meningkatkan produksi komoditi pangan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar.

Lokasi dan Waktu Studi

Penelitian ini dilakukan hanya di daerah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 12 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Data yang diamati terhadap 12 kabupaten tersebut yaitu data tahun 2011 – 2015.

Jenis dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan

penelitian ini, seperti: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Barat dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain (1) Jumlah produksi komoditi pangan; (2) Harga masing-masing komoditi pangan; (3) Nilai produksi komoditi pangan, serta data lain yang berguna bagi penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah data dari semua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu 2011 – 2015. Data yang digunakan adalah data *time series* (runut waktu).

Teknik Analisis Data

1. Komoditi Basis Pajale di Provinsi Sumatera Barat

Alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi komoditi basis yaitu *Location Quotien* (LQ). LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu komoditas pertanian di suatu daerah terhadap besarnya peranan komoditas tersebut secara nasional (Tarigan, 2009). Tujuan analisa LQ yaitu untuk melihat suatu wilayah termasuk basis atau non basis. Perhitungan LQ dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{pi/pt}{Pi/Pt}$$

Secara lebih sederhana perhitungan LQ menurut Hendayana. R dalam Ismatul (2010) dapat diformulasikan sebagai berikut pi adalah produksi komoditas ‘i’ pada tingkat kabupaten, pt adalah produksi total kelompok komoditas pada tingkat kabupaten, Pi adalah produksi komoditas ‘i’ pada tingkat Provinsi, Pt adalah Produksi total kelompok komoditas pada tingkat Provinsi.

Di mana jika $LQ > 1$ berarti sektor basis artinya komoditas i di suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif, $LQ = 1$ berarti sektor non basis, artinya komoditas i di suatu wilayah tidak memiliki keunggulan, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri, dan $LQ < 1$ berarti sektor non basis, artinya komoditas i di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan dari luar. Di mana semakin tinggi nilai LQ sektor di suatu wilayah, semakin tinggi potensi keunggulan sektor tersebut.

2. Spesialisasi dan Lokalisasi Komoditi Pajale di Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adanya spesialisasi dan lokalisasi dari komoditi pangan unggulan ditentukan dengan menggunakan metode gabungan LQ, Kuosien Spesialisasi (KS) dan Kuosien

Lokalisasi (Lo) (Ropingi dan Yanwar, 2008).

a. Kuosien Spesialisasi (KS)

Penggunaan Kuosien Spesialisasi (KS) untuk mengetahui spesialisasi terhadap suatu kegiatan pertanian di suatu wilayah kabupaten dan spesialisasi terhadap komoditi pangan tertentu di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nilai KS diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KS = \left(\frac{w_i}{w_t} \right) - \left(\frac{W_i}{W_t} \right)$$

$$KS = \sum_{p=1}^n KS_{ip}$$

Di mana KS adalah Kuosien spesialisasi terhadap komoditi i, w_i adalah nilai produksi komoditi pangan i pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, w_t adalah nilai produksi total komoditi pangan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, W_i adalah nilai produksi komoditi pangan i pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, W_t adalah nilai produksi total komoditi pangan pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, KS adalah kuosien spesialisasi dan KS_{ip} adalah KS_i positif. Jika nilai KS kabupaten mendekati satu atau $KS \geq 1$ maka di tingkat kabupaten terdapat spesialisasi terhadap kegiatan komoditi pangan. Dan jika KS mendekati nol atau $KS = 0$ maka

ditingkat kabupaten tidak terdapat spesialisasi terhadap kegiatan komoditi pangan.

b. Kuosien Lokalisasi (Lo)

Penggunaan Kuosien Lokalisasi (Lo) untuk mengetahui tingkat penyebaran kegiatan pertanian di suatu wilayah kabupaten dan tingkat penyebaran komoditi pangan tertentu di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menghitung nilai Lo digunakan rumus sebagai berikut:

$$Lo_i = \left(\frac{w_i}{W_i} \right) - \left(\frac{w_t}{W_t} \right)$$
$$Lo = \sum_{p=1}^n Lo_{ip}$$

Di mana Lo_i adalah kuosien lokalisasi terhadap komoditi i , w_i adalah nilai produksi komoditi pangan i pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, w_t adalah nilai produksi total komoditi pangan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, W_i adalah nilai produksi komoditi pangan i pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, W_t adalah nilai produksi total komoditi pangan-pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, Lo adalah kousien spesialisasi dan Lo_{ip} adalah KS_i positif. Jika nilai Lo kabupaten mendekati satu atau $Lo \geq 1$ maka di tingkat kabupaten terjadi pemusatan terhadap kegiatan komoditi

pangan. Dan jika Lo mendekati nol atau $KS = 0$ maka ditingkat kabupaten tidak terjadi pemusatan terhadap kegiatan komoditi pangan.

3. Komoditi Prioritas Pajale di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menentukan komoditi pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yaitu berdasarkan analisis gabungan dengan melihat nilai LQ terbesar dan KS paling tinggi dari komoditi pangan di tiap kabupaten. Semakin besar nilai LQ suatu komoditi maka semakin besar pula potensi keunggulan komoditi tersebut. Dan begitu juga jika nilai kuosien spesialisasinya paling tinggi dari berbagai komoditi yang ada berarti komoditi tersebut mempunyai keunggulan komparatif untuk diproduksi di kabupaten tersebut. Komoditi pangan yang memiliki LQ terbesar dan KS tertinggi yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan lebih baik lagi di suatu daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komoditi Basis Pajale Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data yang dianalisis dengan *Location Quotien* (LQ) pada Tabel 1. menunjukkan bahwa setiap daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki komoditi basis yang berbeda beda. Di mana komoditi basis ditunjukkan

dengan nilai LQ, jika $LQ < 1$ berarti bukan komoditi basis dan sebaliknya jika $LQ > 1$ berarti komoditi basis. Ropingi (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai LQ di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditi tersebut, artinya kapasitas ekspor suatu daerah serta derajat *self sufficiency* suatu komoditi juga besar.

Ada tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai LQ komoditi padi < 1 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat (lihat Tabel 1). Hal ini

menunjukkan bahwa komoditi padi bukan menjadi komoditi unggulan bagi tiga kabupaten tersebut. Namun terjadi sebaliknya untuk komoditi jagung, di mana hanya ada tiga kabupaten yang menjadi basis komoditi jagung ($LQ > 1$) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kemudian ada delapan kabupaten yang menjadi basis komoditi kedelai di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat.

Tabel 1. Nilai LQ Komoditi Pajale kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Kedelai
1	Kepulauan Mentawai	0,36	0,36	3,10
2	Pesisir Selatan	0,97	1,51	1,07
3	Solok	1,14	0,05	0,57
4	Sijunjung	1,12	0,09	2,14
5	Tanah Datar	1,03	0,37	0,07
6	Padang Pariaman	1,14	0,28	0,05
7	Agam	1,00	0,76	0,78
8	50 Kota	1,03	0,34	0,00
9	Pasaman	1,11	0,59	2,03
10	Solok Selatan	1,02	1,04	2,43
11	Dharmasraya	1,13	0,25	1,89
12	Pasaman Barat	0,48	4,79	3,05

Sumber: Hasil Analisis

Setiap daerah kabupaten memiliki komoditi basisnya masing-masing. Berdasarkan teori basis ekonomi jika komoditi basis tersebut dikembangkan

dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan komoditi lain sehingga adanya komoditi basis akan mampu mendorong perkembangan suatu wilayah.

Karena jika komoditi dikategorikan sebagai komoditi basis, berarti suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya untuk komoditi basis tersebut. Bahkan berpotensi untuk melakukan penjualan komoditi tersebut ke daerah lain (ekspor). Dan apabila itu dilakukan akan menjadi pendapatan bagi daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi nilai LQ maka semakin tinggi kontribusi komoditi basis terhadap perekonomian daerah karena adanya pendapatan yang semakin meningkat yang dihasilkan dari komoditi tersebut (Ropingi, 2008).

2. Spesialisasi dan Lokalisasi Komoditi Pajale Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

a. Kuosien Spesialisasi (KS)

Kuosien Spesialisasi (KS) digunakan untuk mengetahui adanya spesialisasi terhadap kegiatan pertanian di tingkat kabupaten atau mengetahui adanya spesialisasi terhadap komoditi pangan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil analisis KS untuk komoditi pajale di Provinsi Sumatera Barat pada Tabel 2. menunjukkan bahwa tidak ada komoditi pajale yang memiliki nilai KS lebih dari satu atau mendekati satu. Di mana nilai KS yang kurang dari satu atau mendekati nol mengindikasikan bahwa di tingkat kabupaten tidak terdapat spesialisasi kegiatan pertanian tertentu. Tetapi nilai

KS yang positif menunjukkan bahwa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan komoditi pangan tertentu.

Secara umum Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki daerah kabupaten yang terspesialisasi untuk komoditi pajale (nilai $KS < 1$), tetapi setidaknya masih memiliki daerah kabupaten/kota dengan keunggulan komparatif untuk komoditi pajale (nilai KS bernilai positif). Sehingga yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan daya saing komoditi paje dengan meningkatkan produksi dan produktivitas yang akan mendorong kabupaten/kota memiliki spesialisasi terhadap komoditi pajale.

b. Kuosien Lokalisasi (Lo)

Nilai Kuosien Lokalisasi (Lo) menunjukkan tingkat penyebaran atau pemusatan komoditi di suatu wilayah. Jika nilainya mendekati nol berarti keberadaan komoditi tersebut menyebar di beberapa kecamatan di daerah kabupaten. Sedangkan jika nilai lokalisasi mendekati satu berarti komoditi tersebut keberadaannya memusat di suatu kecamatan. Dan Berdasarkan hasil analisis Lo yang ditunjukkan pada Tabel 3. menunjukkan bahwa tidak ada nilai Lo yang mendekati satu tetapi mendekati nol. Hal ini berarti bahwa komoditi pajale di daerah

kabupaten menyebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2. Nilai Rata-rata KS Komoditi Pajale Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015

No.	Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Kedelai
1	Kepulauan Mentawai	0,525	0,079	0,001
2	Pesisir Selatan	0,029	0,061	0,000
3	Solok	0,113	0,114	0,000
4	Sijunjung	0,100	0,108	0,001
5	Tanah Datar	0,026	0,076	0,001
6	Padang Pariaman	0,111	0,086	0,001
7	Agam	0,004	0,029	0,000
8	50 Kota	0,021	0,079	0,001
9	Pasaman	0,087	0,048	0,001
10	Solok Selatan	0,015	0,007	0,001
11	Dharmasraya	0,107	0,090	0,001
12	Pasaman Barat	0,429	0,452	0,001

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 3. Nilai Rata-rata Lo Komoditi Pajale Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015

No.	Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Kedelai
1	Kepulauan Mentawai	-0,001	-0,001	0,003
2	Pesisir Selatan	-0,004	0,062	0,010
3	Solok	0,016	-0,110	-0,050
4	Sijunjung	0,004	-0,021	0,009
5	Tanah Datar	0,003	-0,063	-0,092
6	Padang Pariaman	0,013	-0,069	-0,092
7	Agam	0,001	-0,030	-0,029
8	50 Kota	0,002	-0,059	-0,089
9	Pasaman	0,008	-0,032	0,081
10	Solok Selatan	0,001	0,003	0,076
11	Dharmasraya	0,003	-0,015	0,019
12	Pasaman Barat	-0,055	0,398	0,208

Sumber: Hasil Analisis

Sama halnya dengan nilai KS, secara umum Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki kabupaten dengan nilai Lo lebih dari 1 untuk komoditi pajale. Hal ini menunjukkan

bahwa daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan komoditi pajale, karena saat ini komoditi pajale tersebar

merata di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten. Dengan penyebaran komoditi seperti ini maka daerah-daerah tidak perlu memobilisasi komoditi pajale dari luar daerah karena setiap daerah mampu memproduksi kebutuhan pangannya.

c. Komoditi Prioritas Pajale Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Komoditi pajale prioritas kabupaten ditentukan dengan nilai KS dan LQ yang relatif tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut maka komoditi padi yang menjadi yang menjadi komoditi prioritas untuk

dikembangkan yaitu di Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Padang Pariaman lihat Tabel 4). Sedangkan untuk komoditi jagung hanya menjadi prioritas di satu kabupaten saja yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian untuk komoditi kedelai yang semua kabupaten memiliki nilai KS yang rendah sehingga tidak bisa menjadi komoditi prioritas untuk kabupaten karena tidak memenuhi kriteria. Namun jika dilihat dari nilai LQ-nya saja, maka Kabupaten Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai yang memiliki nilai LQ yang relatif tinggi untuk komoditi kedelai.

Tabel 4. Prioritas Komoditi Pajale Unggulan Untuk Dikembangkan di setiap Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

No.	Kabupaten/Kota	Padi		Jagung		Kedelai	
		LQ	KS	LQ	KS	LQ	KS
1	Kepulauan Mentawai	0,36	0,525	0,36	0,079	3,10	0,001
2	Pesisir Selatan	0,97	0,029	1,51	0,061	1,07	0,000
3	Solok	1,14	0,113	0,05	0,114	0,57	0,000
4	Sijunjung	1,12	0,100	0,09	0,108	2,14	0,001
5	Tanah Datar	1,03	0,026	0,37	0,076	0,07	0,001
6	Padang Pariaman	1,14	0,111	0,28	0,086	0,05	0,001
7	Agam	1,00	0,004	0,76	0,029	0,78	0,000
8	50 Kota	1,03	0,021	0,34	0,079	0,00	0,001
9	Pasaman	1,11	0,087	0,59	0,048	2,03	0,001
10	Solok Selatan	1,02	0,015	1,04	0,007	2,43	0,001
11	Dharmasraya	1,13	0,107	0,25	0,090	1,89	0,001
12	Pasaman Barat	0,48	0,429	4,79	0,452	3,05	0,001

Sumber: Hasil Analisis

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat menjadi basis komoditi padi karena memiliki nilai $LQ > 1$, kecuali Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten yang menjadi basis komoditi jagung adalah Pesisir Selatan, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kemudian Kabupaten Kepulauan mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Pasaman, Dharmasraya dan Pasaman Barat.

2. Tidak ada kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki indeks spesialisasi (KS) dan indeks pemusatan (Lo) yang lebih dari 1 untuk komoditi pajale. Artinya komoditi pajale tersebar secara merata di daerah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
3. Komoditi padi menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Padang Pariaman. Kabupaten Pasaman Barat menjadi satu-satunya yang dipriortitaskan mengembangkan komoditi jagung. Sedangkan tidak ada satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang bisa diprioritaskan untuk mengembangkan komoditi kedelai.

Komoditi pangan khususnya padi, jagung dan kedelai sangat penting

peranannya dalam ketahanan pangan nasional. Adanya Kebijakan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) yang tertuang dalam peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2015 merupakan sebuah langkah strategis guna terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan untuk mengidentifikasi daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi pajale guna mencapai swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah. Dengan adanya indentifikasi dan pemetaan daerah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing maka target swasembada pangan pun bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia [BPS RI]. (2016). *Produksi Tanaman Pangan: Angka Tetap Tahun 2015*. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- Faiz, Asman Al. (2011). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa*. Skripsi. Program Sarjana

- Fakultas Ekonomi. Semarang.
Universitas Diponegoro.
- Gammell, Norman. (1994). *Ilmu Ekonomi Pembangunan: Beberapa Survei*. Jakarta: PT Pustaka LPSES Indonesia.
- Handewi, Rachman. (2003). *Penentuan Komoditas Unggulan di Tingkat Provinsi*. Makalah Lokakarya “Sintesis Komoditas Unggulan Nasional”. Bogor
- Hidayah, Ismatul. (2010). *Analisis Prioritas Komoditas Unggulan Perkebunan Daerah Kabupaten Buru*. Maluku: AGRIKA
- Jhingan, M. L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia [Kementan RI]. (2015). *Outlook Komoditi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan: Jagung*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: Jakarta
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia [Kementan RI]. (2015). *Outlook Komoditi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan: Kedelai*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: Jakarta
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia [Kementan RI]. (2015). *Outlook Komoditi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan: Padi*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: Jakarta
- Naufal, Agus. (2010). *Peranan Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Pemerintah Aceh*. Skripsi. Program Sajarna Departemen Ilmu Ekonomi. Bogor: IPB
- Prabowo, Rossi. (2010). *Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia*. Jurnal Mediagro.Vol 6, No. 2, Hal. 62-73.
- Ropingi, dan Yanwar Sudartono. (2008). *Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditas Pertanian di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian.Vol.4, No.2
- Sastrosoenarto, Hartarto. (2006). *Insutrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. Jakarta: Imagon Sum Creatius
- Simatupang, Pantjar. (2007). *Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi.Vol 25, No.1, Hal 1-18.

- Simatupang, Pantjar., I W. Rusastra. (2004). *Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi* . Hal 31-52 dalam F.Kasryno,E.Pasandaran dan A.M Fagi (Ed). *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Jakarta
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (edisi ketujuh). Jakarta: Erlangga.
- Zulhadi, Trian. (2010). *Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim